



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
SAMARINDA

# RENCANA AKSI KINERJA

2023

☎ 0542-262062

✉ informasi@ptun-samarinda.go.id

🌐 www.ptun-samarinda.go.id

JL. BUNG TOMO NO. 136 SAMARINDA  
KALIMANTAN TIMUR - 75132

## RENCANA AKSI KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan dari perjanjian kinerja adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian kinerja dibangun agar sasaran kinerja yang terdapat pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat terukur dengan target kinerja yang relevan. Untuk melaksanakan perjanjian kinerja tersebut maka dibutuhkan Rencana Aksi Kinerja yang nyata dan terukur.

Rencana Aksi Kinerja menghubungkan antara rencana *outcome* yang ada dalam Indikator Kinerja Utama sebagai tahapan-tahapan kinerja yang dapat terpantau dan terevaluasi secara berkala oleh pimpinan. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023 diharapkan mampu menjadi acuan pelaksanaan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2023 dalam mencapai target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Demikian penyusunan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023 dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang Profesional, Berintegritas, Modern dan Mandiri, serta Akuntabel.

Samarinda, 17 Februari 2023  
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda  
KETUA, *g*



ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum.

NIP. 19760705 200003 2 002

**RENCANA AKSI KINERJA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA  
TAHUN 2023**

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%	80%	80%	80%
		2. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	60%	60%	60%	60%
		3. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	100%	100%	100%	100%

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu (Penyelesaian Perkara TUN selama 5 Bulan sebagaimana SEMA No.2 Tahun 2014)	√	√	√	√	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Jumlah Perkara Tingkat Pertama yang selesai sampai dengan minutasi 2. Jumlah Perkara Tingkat Pertama yang telah selesai dan tidak melewati batas waktu 3. Jumlah Perkara Tingkat Pertama yang telah selesai dan melewati batas waktu	-
2	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	√	√	√	√	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Jumlah Perkara Tingkat Pertama yang selesai sampai dengan minutasi 2. Jumlah Perkara Tingkat Pertama yang telah selesai dan tidak mengajukan banding dan kasasi 3. Jumlah Perkara Tingkat Pertama yang telah selesai dan mengajukan banding dan kasasi	-
3	Survey Responden	√	√	√	√	Index Kepuasan	Terwujudnya Proses	1. Jumlah Reponden Penerima	-

	Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan					Masyarakat terhadap Layanan Peradilan	Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Survey Layanan Pengadilan pada tiap triwulan 2. Jumlah Reponden Penerima Survey Layanan Pengadilan yang merasa puas terhadap layanan Pengadilan. 3. Jumlah Responden Penerima Survey Layanan Pengadilan yang merasa tidak puas terhadap layanan Pengadilan.	
--	---	--	--	--	--	---------------------------------------	--	---	--

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang diterima oleh para pihak tepat waktu	80%	80%	80%	80%

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1	Jumlah Salinan Putusan yang diterima para pihak tepat waktu (berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2011)	√	√	√	√	Persentase Salinan Putusan yang diterima para pihak tepat waktu	Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Jumlah Perkara TUN Tingkat Pertama yang telah diputus 2. Jumlah Salinan Putusan Perkara TUN Tingkat Pertama yang telah diterima para pihak tepat waktu (setelah pembayaran PNBP). 3. Jumlah Salinan Putusan Perkara TUN Tingkat Pertama yang belum diterima para pihak.	-

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	20%	60%	100%	-
		2. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	25%	50%	75%	100%

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara (prodeo)	√	√	√	-	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara (prodeo)	Akses Peradilan bagi Masyarakat Misikin dan Terpinggirkan	1. Jumlah Perkara Prodeo yang masuk 2. Jumlah Perkara Prodeo yang telah diselesaikan 3. Jumlah Perkara Prodeo yang belum diselesaikan	1.000.000,-
2	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	√	√	√	√	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	Akses Peradilan bagi Masyarakat Misikin dan Terpinggirkan	1. Jumlah Masyarakat Golongan Tertentu yang menjadi tolak ukur capaian (96 orang) 2. Jumlah Masyarakat Golongan Tertentu yang menerima layanan bantuan hukum 3. Jumlah Masyarakat yang bukan Golongan Tertentu yang menerima layanan bantuan hukum	32.900.000,-

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	1. Persentase Putusan Perkara yang ditindaklanjuti		-	2%	3%
		2. Persentase Putusan Perkara yang dimohonkan eksekusi	-	-	10%	10%

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1	Jumlah Putusan Perkara Tingkat Pertama yang ditindaklanjuti	√	√	√	√	Persentase Putusan Perkara Tingkat Pertama yang telah BHT dan telah ditindaklanjuti	Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	1. Jumlah Putusan Perkara Tingkat Pertama yang telah BHT 2. Jumlah Putusan Perkara Tingkat Pertama yang telah BHT dan ditindaklanjuti 3. Jumlah Putusan Perkara Tingkat Pertama yang telah BHT dan belum ditindaklanjuti	-
2	Jumlah Putusan Perkara yang dimohonkan eksekusi	√	√	√	√	Persentase Putusan Perkara Tingkat Pertama yang telah BHT dan telah dimohonkan eksekusi	Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	1. Jumlah Putusan Perkara Tingkat Pertama yang telah BHT 2. Jumlah Putusan Perkara Tingkat Pertama yang telah BHT dan dimohonkan eksekusi 3. Jumlah Putusan Perkara Tingkat Pertama yang telah BHT dan tidak dimohonkan eksekusi	-



NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
5	Meningkatnya Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset	1. Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Operasional dan Pemeliharaan, Dan Belanja Modal (DIPA 01)	25%	60%	85%	98%
		2. Persentase Penyerapan Anggaran Manajemen Peradilan Militer dan TUN (DIPA 05)	25%	50%	75%	98%

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1	Realisasi Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal	√	√	√	√	Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal	Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset	1. Jumlah Pagu Anggaran DIPA 01 2. Jumlah Realisasi Anggaran DIPA 01 3. Jumlah Anggaran DIPA 01 yang belum terserap	6.134.752.000
2	Realisasi Anggaran Belanja Pengamanan Sidang, Belanja Pembebasan Biaya Perkara dan Belanja Posbakum	√	√	√	√	Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pengamanan Sidang, Belanja Pembebasan Biaya Perkara dan Belanja Posbakum	Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset	1. Jumlah Pagu Anggaran DIPA 05 2. Jumlah Realisasi Anggaran DIPA 05 3. Jumlah Anggaran DIPA 05 yang belum terserap	36.400.000,-

Samarinda, 17 Februari 2023  
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda  
KETUA,



ELIZABETH E. HIL TOBING, S.H., M.Hum.  
NIP. 19760705 200003 2 002